

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI UTARA

DEVELOPMENT OF SULAWESI UTARA POVERTY



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI UTARA

DEVELOPMENT OF SULAWESI UTARA POVERTY



**PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DEVELOPMENT OF SULAWESI UTARA POVERTY

2014

Nomor ISBN / *ISBN Number* :

Nomor Publikasi / *Publication Number* : 71523.1502

Katalog BPS / *BPS Catalogue* : 3205011.71

Ukuran Buku / *Book Size* : 20.5 x 29 cm

Jumlah Halaman / *Number of Page* : 35 halaman / *pages*

Naskah / *Manuscript* : Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Gambar Kulit/ *Cover Design* : Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Penyunting / *Editor* : Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik

Diterbitkan oleh / *Published by* : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Dicetak oleh / *Printed by* : CV. Bahu Bahtera Indah

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

May be cited with refers to source.

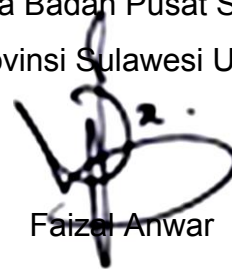
KATA PENGANTAR

Publikasi Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara 2014 merupakan publikasi kedua tentang kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Sulawesi Utara. Publikasi ini diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2012 – 2014.

Publikasi ini menyajikan konsep definisi dan metodologi untuk mendapatkan berbagai angka tentang kemiskinan. Data dan analisis yang disajikan dalam publikasi ini adalah keadaan Bulan Maret dan September dalam periode waktu 2012 – 2014.

Kepada semua pihak yang telah membantu diucapkan terima kasih.

Manado, April 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara



Faizal Anwar

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
I Pendahuluan	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan	2
1. 3. Sistematika Penulisan	2
II Metodologi Penghitungan Penduduk Miskin	3
2. 1. Metode Penghitungan Kemiskinan	3
2. 2. Indikator Kemiskinan	7
2. 3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan	8
III Perkembangan Kemiskinan di Sulawesi Utara	13
3. 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara, 2012 – 2014	13
3. 2. Perkembangan Garis Kemiskinan	16
3. 3. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	18
3. 4. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran	20
IV Perbandingan Tingkat Kemiskinan Secara Nasional	21
V Lampiran.....	25
Daftar Pustaka	31

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Sulawesi Utara, 2014	17
Tabel 2 Gini Ratio Menurut Klasifikasi Daerah Sulawesi Utara, September 2014	20

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara, 2012 – 2014	14
Gambar 2 Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara Menurut Klasifikasi Daerah, 2012 – 2014	15
Gambar 3 Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Utara, 2012 – 2014 (Rp/kapita/bulan)	17
Gambar 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Utara, 2012 – 2014	18
Gambar 5 Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) Sulawesi Utara, 2012 – 2014	20
Gambar 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, 2012 – 2014	21
Gambar 7 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, September 2014	22
Gambar 8 Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Indonesia, 2012 – 2014	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di semua negara. Kompleksnya permasalahan kemiskinan membuatnya terus menjadi masalah serius dan penting di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan Negara berkembang.

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret.

1.2. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara menurut daerah perkotaan dan perdesaan pada kondisi September 2014. Disajikan juga data series mulai dari Maret 2012 untuk menampilkan perkembangan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara.

Sumber data yang digunakan dalam berbagai analisa pada publikasi ini adalah data Susenas Modul Konsumsi dan Kor.

Data kemiskinan dalam publikasi ini diolah dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk, sehingga ada sedikit perbedaan antara angka dalam publikasi ini dibandingkan angka sebelumnya yang sudah dipublikasikan lewat media yang lain.

1.3. Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang konsep kemiskinan yang digunakan, metode penghitungan garis kemiskinan, profil kemiskinan, ukuran kedalaman kemiskinan, ukuran keparahan kemiskinan, dan ukuran distribusi dan ketimpangan pendapatan.

Bab III membahas tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk menurut daerah perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Utara.

Bab IV membahas perbandingan tingkat kemiskinan secara nasional.

BAB II

METODOLOGI PENGHITUNGAN PENDUDUK MISKIN

2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan

A. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

B. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan dalam periode triwulanan. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

C. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk

miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

D. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp} ,$$

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

- Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.
 V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.
 j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).
 p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}},$$

- K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.
 $\overline{HK}_{jp}$ = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100,$$

- GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari
 j = Daerah (perkotaan/perdesaan)
 p = Provinsi p

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul

konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) 2004. SPKKD adalah sebuah survei yang dilakukan untuk menentukan jenis-jenis komoditi dasar non-makanan. Responden dalam survei ini adalah rumah tangga. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

- $GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.
- V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).
- r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).
- k = Jenis komoditi non-makanan terpilih.
- j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).
- p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \times 100\%$$

- $\%PM_p$ = % Penduduk miskin di provinsi p.
- PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p.
- P_p = Jumlah penduduk di provinsi p.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p$$

PM_I = Penduduk miskin Indonesia.

PM_p = Penduduk miskin provinsi p.

n = Jumlah provinsi.

Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\%PM_I = \frac{PM_I}{P_I} \times 100\%$$

$\%PM_I$ = Persentase penduduk miskin (secara nasional).

PM_p = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).

P_I = Jumlah penduduk Indonesia.

2.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha},$$

α = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha = 1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan jika $\alpha = 2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*).

2.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b},$$

- A = jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar daripada X
- N = jumlah penduduk total dan
- b = parameter yang nilainya antara 1 dan 2

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai Pareto Law, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

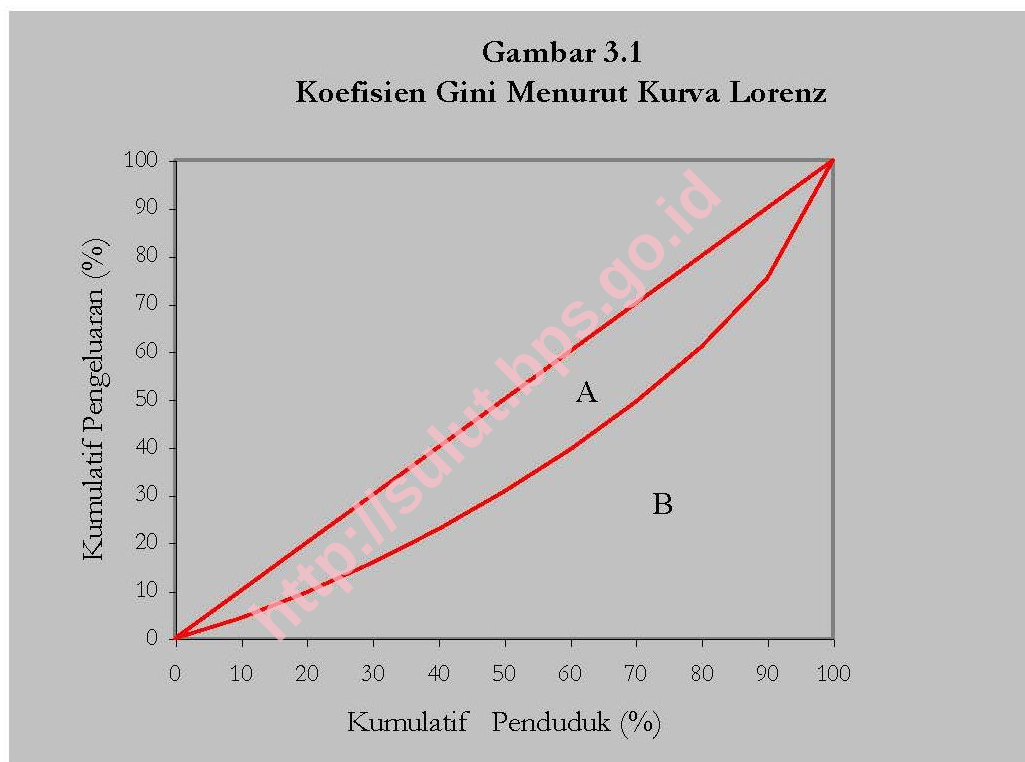
Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan ukuran koefisien Gini (*Gini Ratio*) untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan.

Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i * (Fc_i + Fc_{i-1}),$$

- GR = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)
- fp_i = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke- i
- Fc_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- i
- Fc_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke $(i-1)$

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horisontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai

$A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi. Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat

didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (*sub-group*).

- Dapat diuji secara statistik. Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

<http://sulut.bps.go.id>

BAB III

PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI SULAWESI UTARA

3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara, 2012 - 2014

Penurunan kemiskinan terjadi pada periode Maret – September 2012 kemudian mengalami peningkatan mulai Maret 2013 dan mengalami penurunan kembali pada September 2014. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara pada periode 2012 - 2014 terjadi perubahan yang tidak terlalu signifikan.

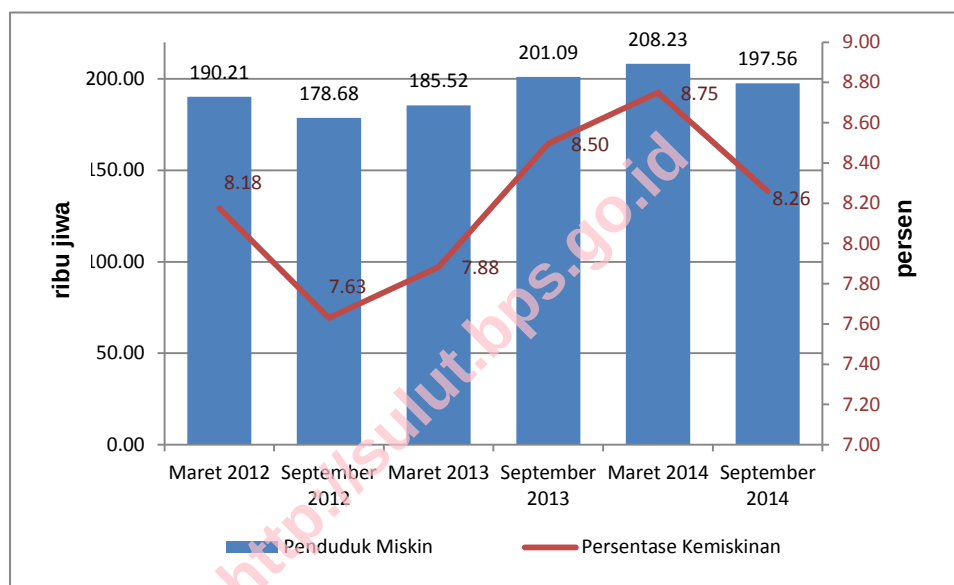
Pada rentang Maret - September 2012 angka kemiskinan Sulawesi Utara mengalami pergerakan turun dari 8,18 persen menjadi 7,63 persen atau turun sebanyak 0,55 persen dan jumlah penduduk miskin turun dari 190,21 ribu jiwa menjadi 178,68 ribu jiwa atau turun sebanyak 11,53 ribu jiwa.

Memasuki tahun 2013 angka kemiskinan Sulawesi Utara mengalami pergerakan naik dan terus naik dengan angka yang relatif kecil sampai pada Maret 2014. Kenaikan ini disebabkan oleh banyak faktor. Faktor inflasi atau kenaikan harga-harga barang merupakan salah satu pemicu naiknya angka kemiskinan di Sulawesi Utara. Apalagi jika kenaikan tingkat inflasi tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan per kapita yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, sehingga terdapat sebagian penduduk yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Tingkat inflasi Kota Manado tahun 2012 tercatat sebesar 6,04 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 8,12 persen atau naik sebanyak 2,08 persen. Tingkat inflasi Kota Manado tahun 2014 juga mengalami kenaikan

dibanding tahun 2013 tetapi masih di bawah periode 2012 – 2013, yaitu hanya naik sebanyak 1,55 persen menjadi 9,67 persen.

Sementara pada rentang Maret – September 2014 angka kemiskinan kembali mengalami penurunan dari 8,75 persen menjadi 8,26 persen atau turun sebanyak 0,49 persen dan jumlah penduduk miskin turun dari 208,23 ribu jiwa menjadi 197,56 ribu jiwa atau turun sebanyak 10,67 ribu jiwa.

Gambar 1 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara, 2012 - 2014



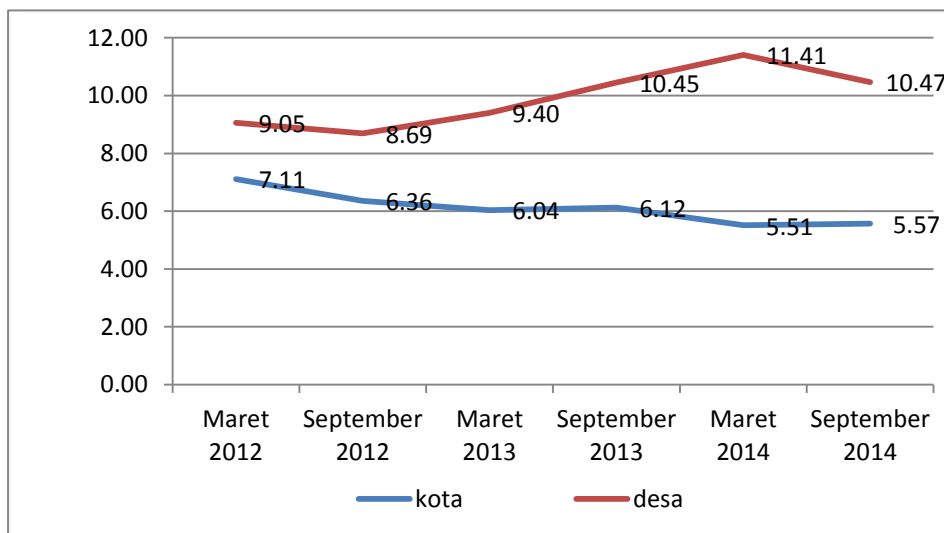
Berdasarkan daerah atau wilayah, pada periode Maret 2012 - September 2014 tercatat tingkat kemiskinan daerah perkotaan berada pada kisaran 5,51 - 7,11 persen sedangkan tingkat kemiskinan daerah perdesaan berada pada kisaran 8,69 – 11,41 persen. Dari angka ini terlihat bahwa tingkat kemiskinan daerah perdesaan selalu lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Angka kemiskinan perdesaan yang selalu tinggi dibandingkan perkotaan salah satu faktor disebabkan oleh fasilitas dan infrastruktur yang ada di perdesaan masih kurang memadai.

Pada gambar 2, yaitu pada tingkat kemiskinan periode Maret 2012 - Maret 2014 terlihat ada kecenderungan jarak kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan semakin melebar. Ini mengindikasikan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin membesar antara penduduk

di perkotaan dan perdesaan. Tetapi memasuki periode Maret – September 2014 terlihat ada kecenderungan jaraknya kembali mengecil.

Pergerakan naik turun angka kemiskinan pada setiap semester di perdesaan cenderung lebih besar dibandingkan di perkotaan. Secara rata-rata pergeseran kemiskinan di perdesaan sebesar 0,80 persen, sementara rata-rata pergeseran kemiskinan di perkotaan hanya sebesar 0,36 persen. Sumber penghasilan utama penduduk sangat mempengaruhi tingkat pendapatannya. Di perdesaan sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian. Tingkat pendapatan penduduk dari pertanian sepertinya tidak dapat mengejar kenaikan harga-harga barang di daerah perdesaan, sehingga hampir pada setiap semester angka kemiskinan selalu bergerak naik dengan angka yang relatif besar dibanding perkotaan. Kemudian pada beberapa periode terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup besar. Hal ini mengindikasikan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di perdesaan. Disamping itu faktor alam/musim juga sangat berpengaruh di sektor pertanian, dimana sebagian besar penduduk perdesaan bekerja di sektor tersebut.

Gambar 2 : Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara Menurut Klasifikasi Daerah, 2012 - 2014



Pada Maret 2014 tercatat angka kemiskinan di perdesaan sebesar 11,41 persen dan angka ini mengalami penurunan pada September 2014 sebesar 10,47 persen. Pada periode yang sama angka kemiskinan di perkotaan sedikit mengalami kenaikan tapi sangat kecil yaitu dari 5,51 persen menjadi 5,57 persen. Salah satu penyebab turunnya angka kemiskinan di perdesaan yaitu karena tingkat kemampuan atau daya beli masyarakat perdesaan utamanya petani yang semakin membaik. Daya beli petani ini dapat diukur dengan pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP). Tercatat NTP di Sulawesi Utara pada Maret 2014 sebesar 99,48 dan mengalami sedikit kenaikan pada September 2014 menjadi 99,87. Angka NTP di bawah 100 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan harga barang yang dibutuhkan/dikeluarkan petani lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan harga produk yang dihasilkan/diterima petani. Akan tetapi tingkat kemampuan atau daya beli masyarakat perdesaan utamanya petani pada kondisi Maret - September 2014 menunjukkan angka yang semakin membaik.

3.2. Perkembangan Garis Kemiskinan

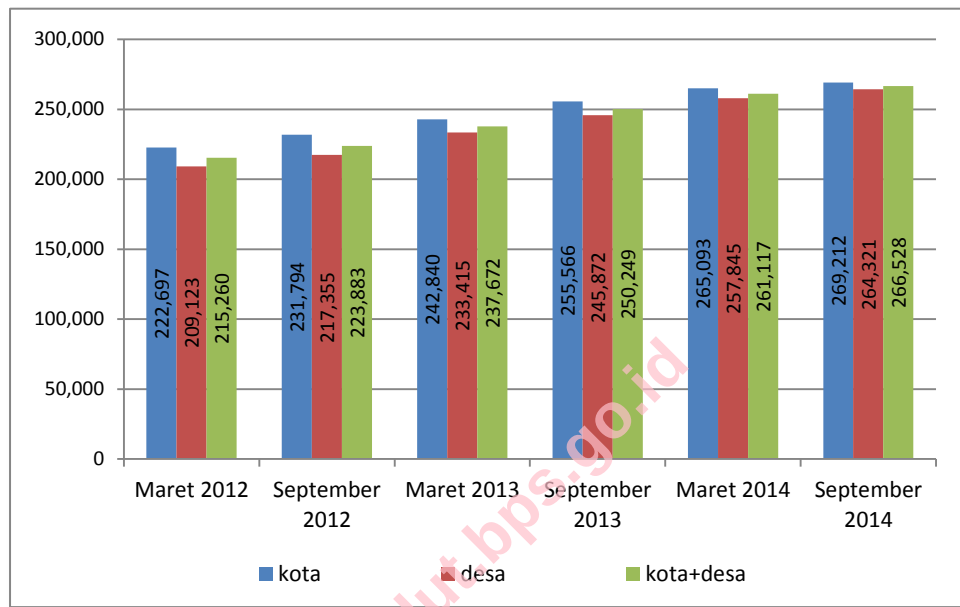
Harga-harga barang maupun jasa akan terus mengalami perubahan dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Ini mengakibatkan terjadi perubahan pula pada angka garis kemiskinan dari waktu ke waktu dengan kecenderungan pola yang menunjukkan kenaikan.

Periode Maret 2012 - September 2014 garis kemiskinan Sulawesi Utara menunjukkan trend yang naik. Pada Maret 2012 garis kemiskinan tercatat sebesar Rp. 215.260 per kapita per bulan, naik menjadi Rp. 266.528 per kapita per bulan pada September 2014.

Sementara itu dari gambar 3 menunjukkan bahwa garis kemiskinan di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibanding di daerah perdesaan. Perbedaan ini disebabkan oleh biaya hidup di perkotaan jauh lebih tinggi dibanding di perdesaan. Hal ini juga menunjukkan perbedaan tingkat

kualitas dari penduduk miskin yang ada di perkotaan dengan yang di perdesaan. Dalam pengertian seseorang yang dianggap miskin di perkotaan belum tentu dianggap miskin di perdesaan.

Gambar 3 : Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Utara, 2012 – 2014
(Rp/kapita/bulan)



Tabel 1 : Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan
Sulawesi Utara, 2014

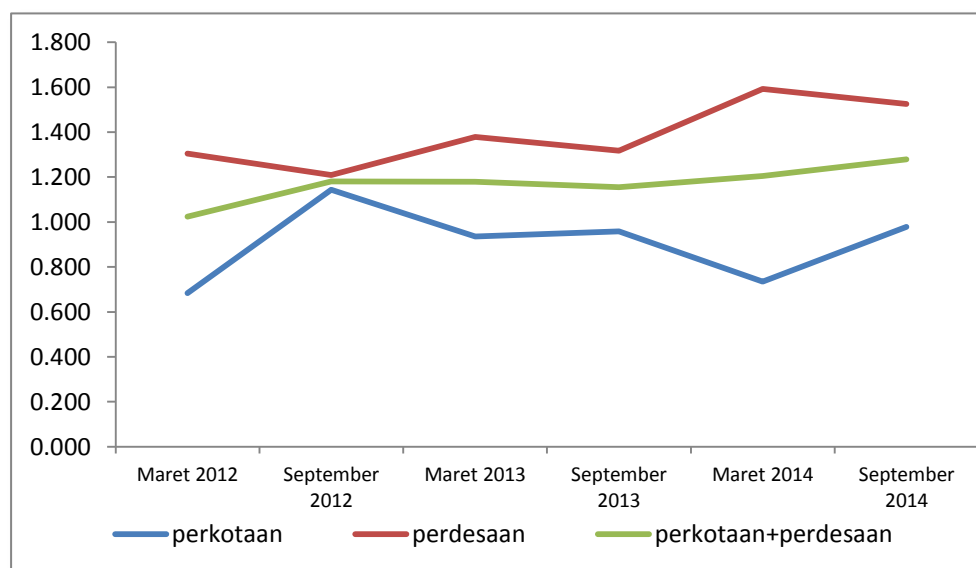
Daerah / Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2014	199.615	65.479	265.093
September 2014	202.492	66.720	269.212
Perdesaan			
Maret 2014	205.000	52.845	257.845
September 2014	210.379	53.942	264.321
Perkotaan + Perdesaan			
Maret 2014	202.569	58.547	261.117
September 2014	206.820	59.708	266.528

Pengukuran garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pada September 2014 GKM Sulawesi Utara sebesar Rp. 206.820 per kapita per bulan sedangkan GKNM sebesar Rp. 59.708 per kapita per bulan. Sumbangan GKM terhadap GK sebesar 77,60 persen, hal ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan menjadi hal yang utama bagi pemenuhan kebutuhan penduduk miskin. Demikian juga dengan kondisi Maret 2014 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 77,58 persen, masih jauh lebih besar dibandingkan dengan sumbangan GKNM terhadap GK.

3.3. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap*) dan keparahan kemiskinan (*Poverty Severity*).

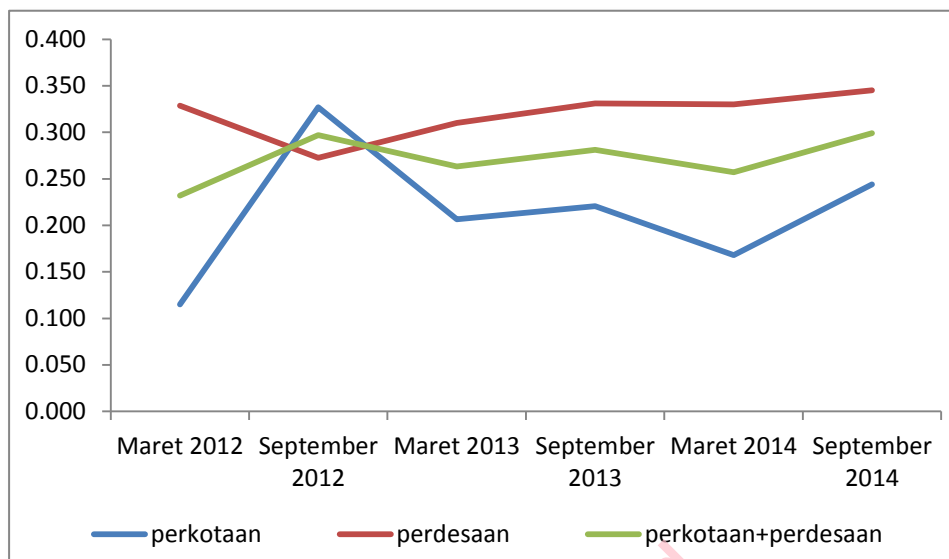
**Gambar 4 : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Sulawesi Utara, 2012 - 2014**



Dari tahun 2012 – 2014 terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan Sulawesi Utara berfluktuasi naik turun pada setiap periodenya. Indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan selalu berada di bawah daerah perdesaan. Ini menggambarkan pada periode ini kondisi kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dibandingkan di daerah perkotaan. Di daerah perdesaan rata-rata jarak pengeluaran perbulan penduduk miskin terhadap GK cukup lebar. Yang terlihat menarik adalah ketika P1 daerah perkotaan mengalami penurunan justru daerah perdesaan mengalami kenaikan begitu pula sebaliknya. Pola ini mengindikasikan bahwa di saat penduduk miskin perkotaan semakin mampu untuk keluar dari garis kemiskinan sebaliknya penduduk miskin perdesaan malah semakin terpuruk menjauhi garis kemiskinan, begitu pula sebaliknya dimana kondisi ini terjadi pada periode-periode tertentu.

Menurut penghitungan indeks keparahan kemiskinan (P2) terlihat bahwa pada periode tahun 2012 – 2014 angka Sulawesi Utara menunjukkan fluktuasi yang naik turun sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan. Pada periode ini menurut daerah terlihat daerah perkotaan sempat mengalami ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang lebih besar daripada perdesaan yaitu pada triwulan ketiga tahun 2012. Tetapi kemudian kondisi ini mulai mengalami perubahan pada rentang Maret 2013 – September 2014, ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan. Sampai pada akhir periode yaitu pada September 2014 nilai P2 daerah perkotaan sebesar 0,244 berada di bawah nilai P2 daerah perdesaan sebesar 0,345.

**Gambar 5 : Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Sulawesi Utara, 2012 - 2014**



3.4. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran

Secara umum angka gini rasio Sulawesi Utara pada periode September 2014 hampir mendekati angka 0,45. Ini menunjukkan pemerataan pengeluaran penduduk berada pada kondisi sedang/menengah. Jika melihat perbandingan gini rasio antara daerah perkotaan dan perdesaan tampak bahwa daerah perkotaan berada sedikit di atas daerah perdesaan. Hal ini memberi arti bahwa distribusi pengeluaran penduduk di daerah perkotaan lebih buruk dibandingkan dengan daerah perdesaan.

**Tabel 2 : Gini Ratio Menurut Klasifikasi Daerah
Sulawesi Utara, September 2014**

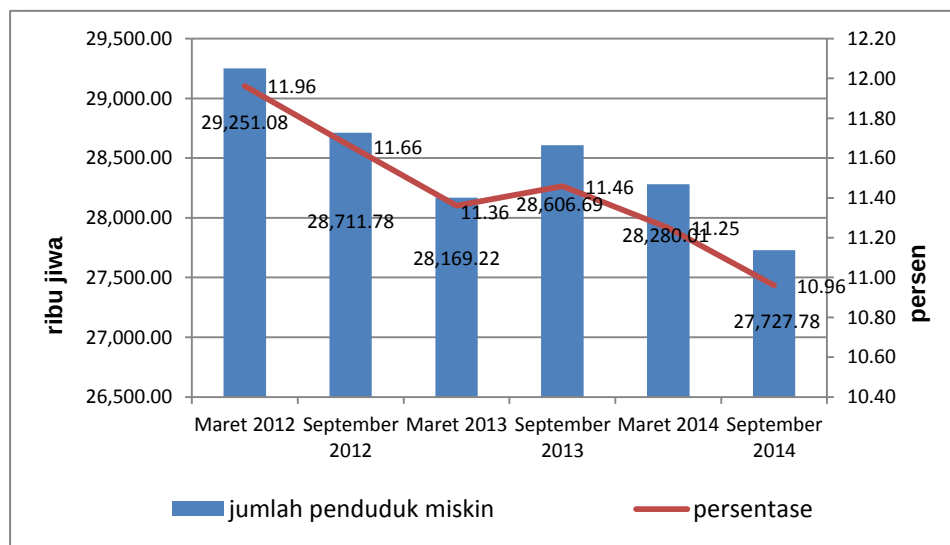
Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)
0,4518	0,3656	0,4357

BAB IV

PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN SECARA NASIONAL

Selama periode tahun 2012 – 2014 penduduk miskin Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun baik secara relatif maupun absolut. Akan tetapi pada September 2013 mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2013. Penduduk miskin pada Maret 2013 sebanyak 28.169,22 ribu jiwa dan persentase nya sebesar 11,36 persen naik menjadi 28.606,69 ribu jiwa dengan persentase sebesar 11,46 persen pada September 2013. Memasuki tahun 2014 kemiskinan Indonesia terus mengalami penurunan sampai akhir periode yaitu September 2014 penduduk miskin Indonesia sebanyak 27.727,78 ribu jiwa dengan persentase sebesar 10,96 persen.

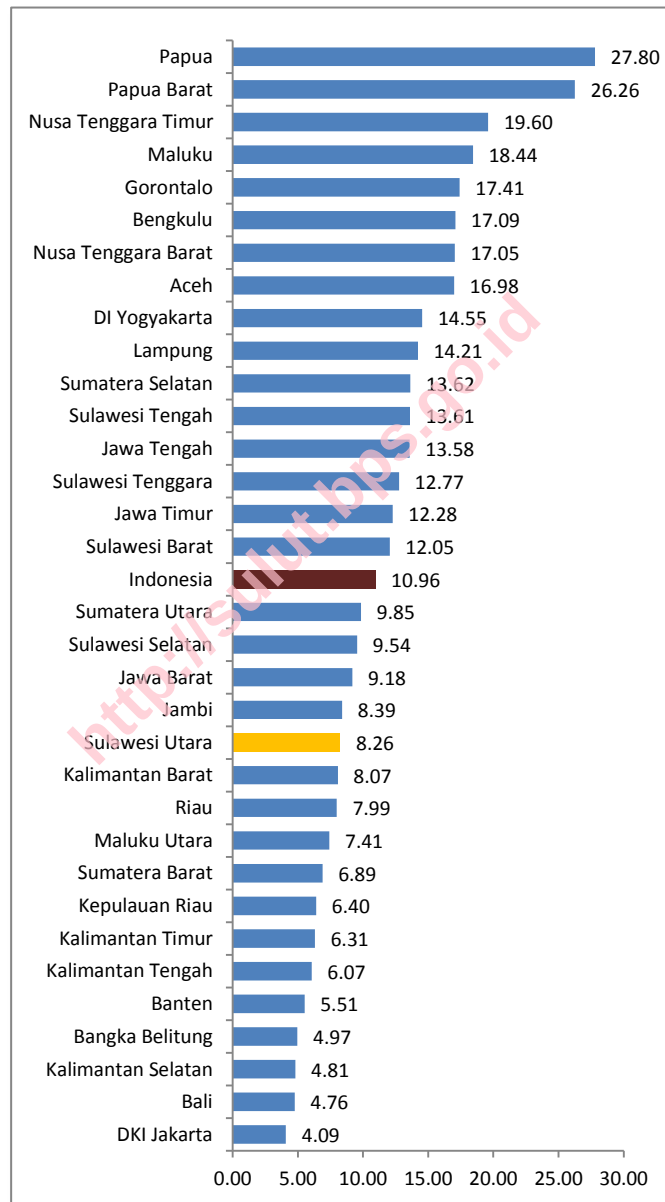
Gambar 6 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, 2012 – 2014



Dilihat dari persentase penduduk miskin yang ditampilkan pada gambar 7 menurut provinsi tampak bahwa persentase penduduk miskin

Sulawesi Utara pada periode September 2014 sebesar 8,26 persen sementara persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 10,96 persen. Hal ini menempatkan posisi tingkat kemiskinan Sulawesi Utara berada di bawah angka Nasional.

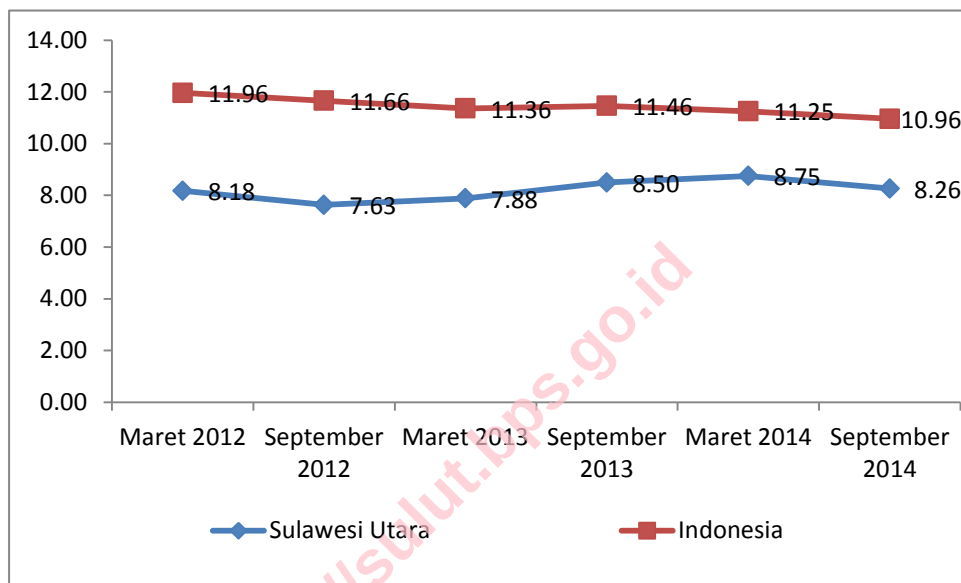
Gambar 7 : Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, September 2014



Secara nasional tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara berada pada posisi terendah ke-13 setelah Provinsi DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Maluku Utara, Riau dan Kalimantan

Barat. Ketika membandingkan dengan provinsi – provinsi yang ada di Pulau Sulawesi tampak bahwa Sulawesi Utara berada pada posisi terbawah tingkat kemiskinannya. Sementara di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua), Sulawesi Utara berada di peringkat kedua terendah setelah Maluku Utara.

Gambar 8 : Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Indonesia, 2012 – 2014



Selama rentang waktu 2012 – 2014 persentase penduduk miskin Sulawesi Utara tidak terjadi pergerakan naik turun yang cukup besar atau menunjukkan kecenderungan konstan sama halnya dengan Indonesia. Persentase kemiskinan tertinggi terjadi pada Maret 2014 sebesar 8,75 persen dan terendah pada September 2012 sebesar 7,63 persen. Pada periode ini persentase penduduk miskin Sulawesi Utara selalu berada di bawah angka nasional.

- Halaman ini Sengaja dikosongkan-

<http://sulut.bps.go.id>

V. LAMPIRAN

**Tabel 5.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Sulawesi Utara, 2012 – 2014**

Bulan dan Tahun	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	%	Jumlah (Ribuan Jiwa)	%	Jumlah (Ribuan Jiwa)	%	Jumlah (Ribuan Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2012	7,11	74,80	9,05	115,41	8,18	190,21
September 2012	6,36	67,24	8,69	111,44	7,63	178,68
Maret 2013	6,04	64,19	9,40	121,33	7,88	185,52
September 2013	6,12	65,36	10,45	135,73	8,50	201,09
Maret 2014	5,51	59,18	11,41	149,05	8,75	208,23
September 2014	5,57	60,08	10,47	137,48	8,26	197,56

**Tabel 5.2. Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah
di Sulawesi Utara, 2012 – 2014**

Bulan dan Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2012	222.697	209.123	215.260
September 2012	231.794	217.355	223.883
Maret 2013	242.840	233.415	237.672
September 2013	255.566	245.872	250.249
Maret 2014	265.093	257.845	261.117
September 2014	269.212	264.321	266.528

**Tabel 5.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Keparahan Kemiskinan (P2)
Menurut Klasifikasi Daerah di Sulawesi Utara, 2012 – 2014**

Bulan dan Tahun	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	P1	P2	P1	P2	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Maret 2012	0,684	0,115	1,304	0,329	1,024	0,232
September 2012	1,144	0,327	1,210	0,272	1,180	0,297
Maret 2013	0,936	0,207	1,379	0,310	1,179	0,263
September 2013	0,958	0,221	1,317	0,331	1,155	0,281
Maret 2014	0,735	0,168	1,593	0,330	1,205	0,257
September 2014	0,978	0,244	1,526	0,345	1,279	0,299

Tabel 5.4. Inflasi Kota Manado, 2012 – 2014

Bulan	Tahun		
	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	-0,13	-0,49	1,06
Februari	0,60	1,30	-0,23
Maret	1,12	1,52	0,31
April	1,63	-0,56	0,30
Mei	-0,84	-0,15	-0,15
Juni	0,50	0,21	0,67
Juli	0,85	3,96	0,85
Agustus	2,16	2,27	-0,26
September	-1,58	-2,10	-0,03
Oktober	0,52	-1,10	1,42
November	1,01	0,44	1,56
Desember	0,10	2,69	3,83
Tahunan	6,04	8,12	9,67

Tabel 5.5. Nilai Tukar Petani Sulawesi Utara, 2014

Bulan	It	Ib	NTP
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	108,36	110,13	98,39
Februari	109,12	110,00	99,20
Maret	109,88	110,46	99,48
April	110,76	111,20	99,60
Mei	111,23	111,29	99,95
Juni	111,50	111,51	99,99
Juli	111,92	112,22	99,73
Agustus	111,56	111,84	99,75
September	112,01	112,16	99,87
Oktober	112,46	113,02	99,51
November	114,01	114,45	99,62
Desember	114,55	117,66	97,35

Keterangan : It = Indeks yang diterima

Ib = Indeks yang dibayar

NTP = Nilai Tukar Petani

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS), 2012, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2013, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2012*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, 2015, *Berita Resmi Statistik Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara September 2014*, Manado : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara**

Jl. 17 Agustus Manado 95119
Telp : 0431-847044, Fax : 0431-862204
Homepage : <http://sulut.bps.go.id>
Email : bps7100@bps.go.id

ISBN : 978-602-1003-12-1

